

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- I Ketut Oka Setiawan, “*Hukum Agraria*” Penerbit Reka Cipta, Bandung, 2023. Edisi Revisi.
- Hajati et al., *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, Edisi Pertama.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, and Agus Setiadi. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV. Global Press, 2018.

Peraturan Perundang - Undangan

- UU RI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (2000).
- PP RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023).
- Permen. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (2018).
- Permen ATR/BPN. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (2022).
- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. “Tata Cara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018” 1 (2020): 1–19.

Jurnal Penelitian

- Alam, Aldani, Joko Sriwidodo, dan Anriz Halim. "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pejabat PPAT Secara Online Penggunaan Aplikasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, Nomor 9 Tahun 2023.
- Apriani, Desi, dan Arifin Bur. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, Nomor 2, 8 Desember Tahun 2020.
- Azminazilah, Yohanna Darmaini, Am-iludin, Dwi Nurfauziah Ahmad, dan Imran Bukhari Razif. "Kepastian Hukum Pengenaan BPHTB Kepada Pemilik Tanah Dan / Atau Bangunan Yang Belum Bersertifikat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." *Officium Notarium* 3, Nomor 2 Tahun 2023.
- Gustia, Marlon. "Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)." *Jurnal IUS IV*, Nomor 1 Tahun 2016.
- Halilah, Siti, dan Arif Fakhurrahman. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, Nomor II Tahun 2021.
- Harianja, Satria Braja, Julia Rahma Sitepu, dan Margaretha Saragih. "Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 7, Nomor 7 Tahun 2019.
- Islami, Khahfi Nur, Sudiman Sihotang, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati. "Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah." *Karimah Tauhid* 3, Nomor 10 Tahun 2024.
- Jamilah. "Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Oleh Masyarakat Melalui Nota-ris." *Jurnal Education and Development Institut Pendi-dikan Tapanuli Selatan* 7, Nomor 4 Tahun 2019.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01, Nomor 01 Tahun 2019.
- Kementerian Keuangan. "Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Lelang," 2020.
- Rajasa, Aqsa, dan Slamet Suhartono. "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Madiun." *YUSTISIA MERDE-KA: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, Nomor 1 Tahun 2023.
- Kominfo Jatim. "Serahkan Sertipikat Tanah Program PTSL, Wali Kota Surabaya _ Kita Harus Selesaikan Semuanya Biar Tidak Ada Mafia Tanah- Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur." Kominfo Jatim, 2024.
- Soleh, A. Khudori. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls." *Jurnal IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 1, Nomor 1 Tahun 2004.

Sudiro, Amoury Adi, and Ananda Prawira Putra. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan." *Jurnal Universitas Al Azhar Indonesia* V, Nomor 1 Tahun 2020.

Gunanegara. "Penyelesaian BPHTB Terutang Sertipikat PTSL Pasca UU No. 1 Tahun 2022." *Lex Jurnalica* 19, no. 2 (2022): 141–56.

Hartana, I.G.A., dan A.M. Candrawati. "Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 7, no. 3 (2019): 114–19. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (2018).

Malaka, Zuman. "Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam* 21, no. 1 (2018): 101–25.

Permatasari, Bela, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, dan Supriyadi. "Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terkait Hibah Wasiat Di Kabupaten Ponorogo." *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 81–91.

Wicaksono, Dian Agung, and Enny Nurbaningsih. "Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum Bagi Pembentuk Undang-Undang Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (August 30, 2022): 503–27. <https://doi.org/10.31078/jk1931>

Website

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>. diakses 10 Desember 2024.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15796/> diakses 12 Desember 2024

www.ejurnal.an-nadwah.ac.id. diakses 14 Desember 2024

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> diakses 15 Desember 2024

<http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia> diakses 18 Desember 2024

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/serahkan-sertipikat-tanah-program-pts-l-wali-kota-surabaya-kita-harus-selesaikan-semuanya-biar-tidak-ada-mafia-tanah>.

diakses 20 Desember 2025